



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 787/IX/2013

II/SEPTEMBER 2013



## **Komisi X Desak Kemenpora Selamatkan Hambalang**



# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA SEPTEMBER 2013

Minggu kedua bulan September, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang mengagendakan beberapa kegiatan Dewan. Rapat Bamus ini mengagendakan penanganan beberapa RUU untuk segera mulai dibahas. Berikut rangkumannya:

## Rapat Bamus 5 September

Rapat Bamus tanggal 5 September mengagendakan tiga acara yaitu membicarakan surat masuk, penanganan beberapa RUU dan membicarakan rencana kunjungan Presiden RRC.

Agenda pertama menangani surat masuk, Bamus membicarakan satu surat dari presiden RI No. R-41/Pres/08/2013 tertanggal 23 Agustus perihal Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Presiden mengajukan 14 nama Calon anggota LPSK Periode 2013-2018 dari 21 calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, DPR-RI diharapkan segera memilih 7 orang diantaranya, dan selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden. Rapat Bamus menyetujui pembahasan Calon Anggota LPSK untuk diserahkan kepada Komisi III DPR-RI.

Agenda kedua mengenai penanganan RUU, ada 4 RUU yang dibahas.

Pertama, RUU tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir). Dalam hasil kajian (abstraksi) RUU ini, antara lain disebutkan bahwa status RUU merupakan RUU Kumulatif Terbuka Prolegnas tahun 2013 dan ditetapkan sebagai RUU Pemerintah. Naskah yang juga disebut Konvensi Terorisme Nuklir ini, pertama kali diajukan pada sesi pertama Komite Ad Hoc PBB yang lahir berdasarkan Resolusi PBB No. 51/2010. Pada saat itu instrumen internasional yang ada belum mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberan-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



atasan terorisme nuklir. Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir yang saat itu merupakan satu-satunya instrumen hukum nuklir yang dapat diacu, terbatas pengaturan proteksi fisik bahan nuklir dan karenanya tidak mengatur zat radioaktif dan fasilitas radiasi yang dapat menjadi target tindakan terorisme. Indonesia menyadari bahwa pengesahan konvensi ini bermanfaat bagi kepentingan nasional dan menunjukkan komitmen kepada keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia, maka diharapkan implementasi Konvensi ini juga akan memperkuat pondasi hukum di Indonesia.

Dalam rangka pembahasan RUU ini, Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menkum-Ham untuk mewakili Presiden dalam membahasnya. Di DPR-RI, RUU ini ditangani oleh Komisi I.

Kedua RUU tentang Panas Bumi. Untuk pembahasan RUU ini, Presiden menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri LH, serta Menkum-Ham untuk mewakili Presiden dalam membahasannya. RUU tentang Panas Bumi akan dibahas oleh Pansus DPR-RI dan Pemerintah.

Pada Hasil Kajian (Abstraksi Materi) RUU Panas Bumi dijelaskan bahwa, saat ini kebutuhan Indonesia akan energi (*energy demand*) terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan energi ini tidak diimbangi dari sisi penyediaan energinya (*energy supply*). Tingginya pertumbuhan permintaan energi tersebut makin memperlebar kesenjangan antara sisi permintaan dan penyediaan energi, yang



Presiden membahas RUU ini. RUU Advokat akan ditangani oleh Pansus DPR-RI dengan prioritas keanggotaan dari Komisi III DPR.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab perlu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur profesi advokat sebelumnya adalah UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Namun keberadaan UU tersebut belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu pembentukan UU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Keempat RUU tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. RUU ini adalah RUU inisiatif Komisi IV DPR-RI dan telah disetujui menjadi

RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna 11 Juli 2013. RUU ini antara lain berisi bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan belum memberikan hasil optimal. Beberapa pasal dalam UU No. 18 tahun 2009 diajukan *judicial review* ke MK, terkait dengan penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan, penguatan otoritas veteriner, serta pemberian sertifikasi halal bagi hewan yang dipersyaratkan. Disamping Putusan MK tersebut, sesuai perkembangan dan pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat, substansi lain yang belum memberikan hasil optimal adalah penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pengeluaran, hasil inseminasi buatan, pencegahan penyakit hewan menular di dalam suatu wilayah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesejahteraan hewan. Berdasar kondisi tersebut, maka perlu penyesuaian atas UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

berujung pada terjadinya krisis energi di beberapa wilayah. Ironisnya, kebutuhan energi tersebut masih tergantung pada bahan bakar fosil yang persediaannya makin menipis. Keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan energi panas bumi terlihat dalam Road Map Pengembangan Bumi 2004-2025. Pada tahun 2025, Indonesia ditargetkan sudah memanfaatkan 9.500 MW panas buminya, atau memberikan kontribusi energi terhadap konsumsi energi nasional sebesar 5% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Secara garis besar pola pengusahaan panas bumi di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pengusahaan panas bumi sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No 27 tentang Panas Bumi. Pola pengusahaan panas bumi sebelum diterbitkannya UU No 27 tahun 2003 (Wilayah Kerja Pertambangan/WKP existing), mengacu pada keputusan presiden No. 22 tahun 1981, Keputusan Presiden No. 45 tahun 1991 dan Kepres No 49 tahun 1991. Sementara sesudah diterbitkannya UU No 27 tahun 2003 (WKP baru), selain mengacu pada UU ini, juga merujuk pada PP No. 59 tahun 2007 jo PP No 70 tahun 2010. Namun demikian, dalam rangka otonomi daerah dan keinginan pemerintah daerah dalam pengelolaan panas bumi, UU ini akan direvisi. Beberapa permasalahan yang mendasari perubahan ini antara lain adalah mengenai pemanfaatan energi panas bumi, ketegasan UU No 27 tahun 2003 tentang pengelolaan kekayaan negara, tujuan pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang kewajiban bagi pemegang IUP, dan lain-lain.

RUU ini oleh Pemerintah akan diwakili oleh Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan serta Menkum-HAM. Sementara di DPR-RI, Komisi IV akan menangani RUU ini.

Ketiga RUU tentang Advokat. RUU ini adalah RUU yang pada Rapat Paripurna tanggal 11 Juli telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR. Untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menkum-HAM untuk mewakili

Agenda ketiga pada Rapat Bamus adalah membicarakan rencana kunjungan Presiden RRC dan pemberian kesempatan pidato dalam rapat paripurna DPR. Sebelumnya, DPR-RI telah menerima surat dari kedubes RRC perihal kunjungan PM China XI Jinping tanggal 22 Agustus 2013. Dalam kunjungan Dubes RRC kepada Ketua DPR dibicarakan mengenai pentingnya hubungan RRC dan RI. Dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah mengenai jadwal acara Presiden China di Indonesia, maka Rapat Bamus DPR memberikan mandat kepada Pimpinan Dewan untuk mencari ruang yang tepat guna memberikan kesempatan kepada Presiden RRC berpidato pada forum lain.\*\*





## Komisi X Desak Kemenpora Selamatkan Hambalang

**Komisi X mendesak Kementerian Pemuda Olahraga bersama Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum untuk segera menyusun rencana rekayasa teknologi dalam rangka penyelamatan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat.**

Pasalnya, dikhawatirkan mega proyek yang digagas pada 2003-2004 ini akan ambruk atau malah justru makin merugikan negara. Hal ini terungkap ketika Komisi X melakukan kunjungan spesifik ke proyek P3SON, Hambalang, Rabu (11/09).

“Dari hasil pengamatan kami langsung ke lokasi proyek Hambalang, memang harus ada rekayasa teknologi terhadap proyek ini. Jangan sampai proyek yang sudah dibangun ini akan ambruk atau menambah kerugian negara yang semakin besar. Oleh karena itu kita mendesak Kemenpora dan Dirjen PU untuk membuat rekayasa teknologi,” desak Anggota Komisi X Zulfadhli di Hambalang.

Anggota yang akrab disapa Zul ini mengaku pihaknya akan berusaha mengamankan proyek ini agar tidak semakin merugikan negara, namun belum ditentukan lebih lanjut bagaimana proyek ini ke depannya. Sedangkan, keinginan

dari Kemenpora ingin tetap melanjutkan proyek ini.

“Kita belum berbicara bagaimana lanjutannya proyek ini, tapi paling tidak kita mengamankan dulu proyek ini. Setelah anggaran untuk pengamanan proyek ini kita tetapkan, baru akan dibicarakan bagaimana tindaklanjut daripada proyek ini ke depan. Kemenpora ingin melanjutkan proyek ini, namun Komisi X belum bisa memberikan pandangan terhadap itu,” tambah Politisi Golkar ini.

Dari hasil kunjungan ini, Zul mendapatkan informasi bahwa untuk rekayasa teknologi dibutuhkan Rp 100 miliar. Namun, pihaknya meminta rincian lebih detail. Hal itu pula diakui Ketua Komisi X Agus Hermanto.

“Kita ingin tahu dari pihak kontraktor, berapa biaya yang dibutuhkan untuk rekayasa teknologi ini, baik untuk penguatan konstruksi bangunan dari seluruhnya. Kira-kira



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X menerima penjelasan dari Kontraktor.

ini membutuhkan Rp 100 miliar, dan ini yang akan menjadi kajian kami,” ungkap Agus.

Dalam kunjungan kedua ke Hambalang ini, Agus menilai tidak ditemukan kerusakan yang signifikan. Namun, ada beberapa rekonstruksi dan perubahan agar tidak muncul kerusakan bangunan yang sudah ada.

“Ke depan, ini menjadi tugas Panja Hambalang. Apakah akan memanfaatkan pembangunan yang ada, ataupun hanya membiarkan saja. Bangunan yang sudah ada, tentu akan lebih baik jika ditingkatkan dan dilanjutkan,” harap Politisi Demokrat ini.

Dalam kunjungan spesifik ini, Anggota Komisi X didampingi beberapa jajaran Kemenpora, dan pihak Adhi Karya selaku kontraktor induk proyek. Walaupun cuaca panas, Anggota Dewan tetap semangat meninjau setiap lokasi, sembari mendengarkan penjelasan langsung dari pihak kontraktor. (sf), foto : sf/parole/hr.

## Pramono Anung : KPK Sudah Menjadi Model Dunia

Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dinilai oleh dunia internasional sebagai model yang berhasil dalam aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Pramono usai pertemuan dengan para duta besar ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (12/9). Pertemuan tersebut membahas persiapan dan undangan untuk pertemuan parlemen dunia termasuk ASEAN dalam forum SEAPAC (South East Asia Parliamentarians Against Corruption) dan GOPAC (Global Parliamentarians Against Corruption).

Rencananya pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Arya Duta 23-24 Oktober di Medan, Sumatera Utara. Para Dubes negara-negara ASEAN mengapresiasi kerja KPK di Indonesia. “Mudah-mudahan kegiatan antikorupsi yang diadakan oleh parlemen ini bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Parlemen kita ingin menunjukkan pada dunia dan masyarakat bahwa kita menyepakati gerakan antikorupsi,” jelas Pramono.

Sejauh ini, lanjut Pramono, Indonesia



Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo.

termasuk cukup maju dalam pemberantasan korupsi, walaupun masih belum berhasil secara menyeluruh. “Yang paling utama kita punya KPK. Dan KPK ini sudah menjadi model dunia.” Pra-

mono mengaku, saat dirinya menjadi pembicara di Brazil dan Afrika Utara beberapa waktu lalu, banyak negara memberi apresiasi yang luar biasa kepada KPK. (mh) foto : od/parole



# Setjen DPR Terima Penghargaan WTP Dari Kemenkeu

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mendapatkan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2012. Penghargaan ini diberikan pada Malam Apresiasi Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013. Acara yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9) malam ini bertema 'Membangun Sinergi Menuju WTP'.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mendapat nomor urut ke dua untuk menerima penghargaan tersebut. Di malam apresiasi ini, Sekjen DPR didampingi oleh Kepala Biro Keuangan Makmur.

Win, begitu ia akrab disapa, menyatakan bahwa penghargaan WTP ini merupakan yang ke empat kalinya yang diterima Setjen DPR. Ia menegaskan, penghargaan ini sebagai pemicu untuk tetap mempertahankan penghargaan yang telah diterima.

"Kita bersyukur karena ini merupakan apresiasi untuk Setjen DPR, sebagai penghargaan tertinggi di dalam mengelola keuangan negara. Kita sudah empat kali berturut-turut menerima penghargaan seperti ini. Ini untuk memacu diri dan mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati ke depannya dalam mengelola keuangan," ujar Win yang ditemui Tim Parle usai acara.

Setiap program yang disusun, tambah Win, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan tetap memperhatikan akuntabilitasnya. Sehingga, untuk tetap mempertahankannya, Win selalu memberikan pengarahan dan setiap bulannya melakukan konsolidasi mengenai laporan keuangan.

"Masing-masing program selalu kita tingkatkan. Kalau



Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima piagam WTP dari Sekjen Kemenkeu.

sudah empat tahun berturut-turut menerima, dan kemudian (penilaian) turun akan membawa dampak bukan hanya kepada Setjen DPR, namun juga DPR itu sendiri. Ke depan harus lebih hati-hati" pesan Win.

Sebelumnya, Sekjen Kemenkeu menyatakan tahun ini terdapat 67 Kementerian/Lembaga Negara yang mendapat opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2012. Acara ini dimeriahkan oleh tarian kontemporer yang dibawakan oleh pegawai Kemenkeu, serta orkestra Diva Baranita dari Kepolisian Republik Indonesia. (sf) foto: wahyu/parle

## Komisi IX DPR Tolak Rencana PHK Pekerja BUMN

Komisi IX DPR menolak rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai ada rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) Outsourcing Komisi IX. Selain itu semua pekerja outsourcing yang masa perjanjian kerjanya akan berakhir, akan tetap dipekerjakan sampai ada rekomendasi Panja Komisi IX.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil



Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka.

Ketua Irgan Chairul Mahfiz dari F-PPP Senin (9/9) dengan Menakertrans Muhaimin Ikandar dan Meneg. BUMN Dahlan Iskan serta 15 Dirut BUMN di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Raker juga menyepakati bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN akan diselesaikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum akhir September 2013. Selain itu, Menteri BUMN juga harus membayar

hak normatif pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah terjadi sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengangkat pekerja *outsourcing* BUMN menjadi karyawan tetap apabila telah memenuhi kriteria ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi IX juga menekankan, Dirut BUMN tetap membayar hak normatif pekerja yang sedang dalam penyelesaian kasus sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

Anggota Komisi IX Indra dari F-PKS, mempertanyakan bayaran yang diterima para pekerja *outsourcing* dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Terkait dengan itu Menteri Nakertrans, Muhaemin Iskandar menjelaskan untuk pekerja *outsourcing* belum ada Inpres mengenai UMP, karena itu akan dibahas nanti dengan Panja *Outsourcing* Komisi IX.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka juga menentang keras pekerja *outsourcing* yang berdasarkan persoalan tender

dengan masa kontrak hanya setahun. Seharusnya kontrak kerja bisa mencapai lima tahun.

Pada raker tersebut, Komisi IX DPR juga mendesak Menteri BUMN dan Menakertrans RI untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan BUMN dan segera menjalankan putusan hukum yang telah memiliki ketetapan hukum tetap (*inkracht*) baik Putusan PHI, MA maupun MK. (sc,if)/  
foto:odjie/parle/iw.

## Pansus DPR Sesalkan Kelambanan Pemerintah Berkoordinasi Selesaikan RUU Tapera

Ketua Pansus RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Yoseph Umarhadi mengatakan, Pimpinan Pansus RUU Tapera Senin (9/9) menggelar rapat dengan agenda perkembangan pembahasan RUU, sebab sesuai reses hingga pembukaan Masa Persidangan I tahun 2013-2014 tanggal 16 Agustus lalu pemerintah tidak berani mengambil keputusan. Bahkan Pansus yang meminta pemerintah melakukan koordinasi belum ditindaklanjuti antara Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan Rakyat. Padahal kesempatan koordinasi ini telah diberikan sejak masa reses yang lalu.

Menurut Yoseph saat ditemui Parle Senin (9/9) di Gedung DPR, RUU Tapera semula dijadwalkan selesai tanggal 9 Juli tetapi pemerintah belum berani mengambil keputusan. Menpera saat itu akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, tetapi sampai memasuki masa persidangan I ternyata pemerintah belum siap juga.

“Kami jadi bertanya-tanya, apakah pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan RUU ini atau pada koordinasi waktu saja. Padahal substansinya hanya berani atau tidak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran membantu rakyat miskin memiliki rumah,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Kalau Kemenpera yang ditunjuk Presiden sebagai *leading sector* untuk membahas RUU Tapera masih menunggu dipanggil Menko Perekonomian dan Menkeu, lalu sampai kapan. Akhirnya rapat Panja RUU Tapera memutuskan untuk menyampaikan masalah ini kepada Pimpinan DPR. “Kami sudah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR bahwa penyelesaian RUU Tapera terkendala oleh pemerintah yang masih menunggu rapat koordinasi. Kami berharap Pimpinan DPR bisa meneruskan kepada Menko Perekonomian, jangan tertunda-tunda lagi,” katanya.



Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi.

Ia menegaskan, Pansus tetap bertekad agar RUU Tapera bisa diselesaikan pada masa persidangan I yang akan berakhir tanggal 25 Oktober yang akan datang. Palsnya para anggota Dewan akan semakin sibuk di daerah pemilihan masing-masing untuk mempersiapkan kampanye pemilu 2014.

Ditambahkan Yoseph, pada Kamis pekan ini akan digelar rapat Panja dengan mengundang pemerintah, sejauh mana perkembangan sikap atas RUU Tapera. “Jangan sampai dianggap DPR malas menyelesaikan pembahasan RUU. DPR justru bertekad RUU ini segera selesai, kita serius dan siap sebab ini kepentingan rakyat dan juga pemerintah dalam

rangka melaksanakan amanat konstitusi bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan rumah bagi rakyat miskin.” papar dia.

Ia melihat, hambatan menuntaskan RUU ini ada di pemerintah, terbukti untuk melakukan rapat koordinasi saja sulit. “Ketiga instansi yakni Menko Perekonomian, Menkeu dan Menteri Perumahan Rakyat untuk berkoordinasi saja sulit, ini kan nggak rasional, telepon bisa dan sering ketemu di rapat Kabinet, masak menunggu berbulan-bulan,” tukasnya dengan menambahkan, Pansus sangat menye-

salkan kelambanan ini.

Ketika didesak, bagaimana kalau nantinya pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah krusial ini, Yoseph menyatakan tetap optimis akan bisa selesai. “Saya optimis, bisa selesai. Lakukan koordinasi saja, jangan menunggu waktu *injure time*, kalau terlalu terburu-buru hasilnya tidak baiklah,” ia menambahkan.

Ada tiga hal yang belum mendapat persetujuan pemerintah yaitu BP Tapera perlu diberi modal awal maksimal 2 triliun, *sharing* dari pemberi kerja

sebab kalau hanya mengandalkan dari masyarakat berpenghasilan rendah, sampai puluhan tahun tidak akan terangkat. Pemberi kerja hanya membantu kepada yang berpenghasilan rendah saja.

Sedangkan yang terakhir adalah BP Tapera nanti berbentuk apa dan bertanggungjawab kepada siapa. DPR berharap bertanggungjawab kepada Presiden dan telah disetujui pemerintah. Bukan Badan Layan Umum (BLU), bukan Persero tetapi badan hukum publik. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## Achsanul Qosasi Pimpin Pansus RUU Keuangan Negara



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menyampaikan selamat kepada Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi.

Achsanul Qosasi Pimpin Pansus RUU Keuangan Negara melalui voting, dengan perolehan suara untuk Fraksi Partai Demokrat 15 suara. Sebelumnya, enam Fraksi tertarik untuk menjadi pemimpin Pansus RUU Keuangan Negara, karena itu, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman sempat menskor rapat

untuk dilakukan forum lobi selama 30 menit.

”Enam Fraksi tertarik untuk menjadi pimpinan. karena itu kita sepakat untuk melakukan forum lobi selanjutnya dibawah ke Forum pleno Pansus,” ujarnya di Ruang Pansus C, Senin, (9/9).

Menurutnya, masing-masing anggota Dewan memilih empat Fraksi yang akan menjadi pimpinan Pansus RUU Keuangan Negara. ”Kita lihat saja siapa yang mendapat suara terbesar, kemudian langsung saja ditetapkan siapa yang menjadi Ketua Pansus dan Wakilnya,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi PDIP 15 suara, Fraksi Partai Golkar 10 suara, PKS dua suara, Fraksi PAN 13 suara dan PPP 13 suara. ”Jadi kita tetapkan Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Edwin Kawilarang (F-PG), Teguh Juwarno (F-PAN), Dimiyati Natakusumah (F-PPP),” jelasnya.

Dirinya mengharapkan Pansus dapat bekerja secara maksimal dan mengejar target legislasi kita. ”Kita sering kedodoran di bidang legislasi saya harap dapat bekerja dengan tepat waktu,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

## Peran Media Pada Pemilu Legislatif Relatif Kecil

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menilai bahwa peran media dalam pemilu legislatif relatif masih kecil. Menurutnya, anggota legislatif yang menggunakan media nasional itu kecil sekali, umumnya mereka masih menggunakan media lokal.

Hal tersebut disampaikan Pramono dalam *round table dis-*

*cussion* bertema “Demokrasi, Parlemen dan Peran Media di Indonesia : Menyambut Pemilu 2014” yang diselenggarakan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI di Gedung Perpustakaan Pusat, Kampus UI, Depok, Senin (9/9)

“Demokrasi parlemen dan peran media, saya harus menyampaikan ini temuan disertasi saya. Disertasi saya meng-





Wakil Ketua DPR Pramono Anung tampil sebagai pembicara di diskusi Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI.

atakan peran media dalam pemilu legislatif relatif masih kecil,” kata Pramono.

Menurutnya, kebanyakan mereka masih secara tradisional menggunakan media-media lokal, dan kampanyenya masih menggunakan pendekatan tradisional, bahkan masih menggunakan kelompok-kelompok komunitas, religi, budaya formal maupun informal.

“Bahkan yang namanya dangdut maknanya lebih kuat pengaruhnya daripada dibandingkan dengan sebuah packaging yang dilakukan oleh sebuah media nasional,” imbuh Pramono.

Ia menyatakan, bahwa media masa untuk pemilu legislatif yang paling berperan adalah media lokal. Dan media lokal ini seorang calon bisa melakukan blocking pada sebuah radio, bahkan

radio itu tidak bisa dimasuki oleh calon lain kecuali yang bersangkutan. Di radio ataupun di koran lokal itu bisa dilakukan *blocking*.

“Hal itu karena begitu kurang berdayanya media lokal, dibandingkan dengan media-media nasional”, tegas Pramono.

Ditegaskan Pramono, bagaimana dalam era demokrasi ini peran media begitu luar biasanya. Apapun yang dilakukan partai politik, pemerintah ataupun lembaga tinggi negara, maka media inilah yang akan menyampaikan kepada publik. Apa yang dikemas dan dikonstruksi oleh media, apa yang dimaknai oleh media, inilah yang ditanggapi oleh masyarakat.

“Seseorang yang mungkin dulunya hitam kelam, oleh media sekarang

dapat dirubah dalam sesaat menjadi terang benderang. Inilah kekuatan media,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

Bahkan Ahkmad Sobari menyebutkan, kata Pramono, sekarang salon kecantikan itu ada pada media. Bagaimana merubah seseorang yang mempunyai kejahatan HAM misalnya, sekarang ini seakan-akan menjadi sangat demokratis. Apa yang menjadi media darling, begitu media *prepareable* kepada yang bersangkutan, maka orang itu bisa menjadi apa saja.

Begitu luar biasanya kekuatan media, bahkan pemilik media sendiri sebenarnya tidak bisa menahan kekuatan media itu sendiri.

Bahkan menurut Pramono, ada pemilik media yang sudah setiap hari beriklan di medianya sendiri, iklan hari raya atau iklan apa saja, ternyata kemunculannya itu tidak membuat publik menjadi suka terhadap yang bersangkutan, kemunculannya yang bertubi-tubi malah membuat muak dari masyarakat.

“Tetapi seseorang yang sedang menjadi media darling, apapun yang dia lakukan maka dia itu menjadi benar,” paparnya.

Inilah luar biasanya kekuatan media, ujar Pramono, sekarang ini sudah menjadi hiperrealitas yang nyata dan yang maya sudah menjadi satu. (sc) *foto:ry/parle*

## Anggaran Kemenperin 2014 Rp 2,622 Triliun

Pagu anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun anggaran 2014 mencapai Rp 2.622.255.470.000. Besaran anggaran tersebut lebih kecil dari pagu anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 3,314 triliun.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Senin (9/9). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) didampingi Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan). Rapat juga membahas alokasi anggaran untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN).



Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto didampingi Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima.

Untuk BSN sendiri, pagu anggaran tahun 2014 mencapai Rp 95,385 miliar. Alokasi anggaran BSN tersebut juga turun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2013 sebesar Rp 98,544 miliar. Bahkan, dalam APBN-P tahun 2013 BSN mendapat anggaran Rp 98,547 miliar.

Dengan pagu anggaran Rp 2,622 triliun, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, iklim investasi dan usaha, dan bidang energi. Selain itu, ada pula prioritas nasional untuk

daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.

Sementara lembaga BSN dalam rapat tersebut telah menetapkan 4 arah kebijakan baru dalam rencana strategis (Renstra) BSN tahun 2010-2014. Renstra tersebut, yaitu meningkatkan kualitas SNI sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI, meningkatkan budaya standar, dan memperkuat kelembagaan dan peran BSN. (mh) foto:iwan armanias/parle

## BK : Merokok Dalam Ruang Sidang ada Sanksinya

Ketua Badan Kehormatan - BK DPR RI Trimedy Panjaitan mengatakan aturan tata tertib dewan tegas mengatur larangan merokok pada saat mengikuti persidangan. Ia mengaku akan segera menindaklanjuti munculnya foto anggota Komisi X Wayan Koster disejumlah media yang terlihat sedang menghisap rokok saat rapat.

"Berdasarkan UU MD3, BK itu bekerja apabila ada pengaduan masyarakat. Kita segera rapat mencari tahu apa ada pengaduan atau apa perlu BK bertindak tanpa pengaduan dalam kasus ini," katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/13).

Ia menambahkan dalam tata tertib sudah diatur sanksi tegas bagi anggota



Ketu BK DPR Trimedy Panjaitan.

dewan yang setelah melewati proses pemeriksaan memang benar terbukti merokok saat mengikuti sidang.

"Sanksinya tidak pemecatanlah, tapi bisa pindah komisi, tidak boleh bertugas di pansus, peringatan lisan atau tertulis," lanjut politisi Fraksi PDIP ini.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR ini meyakinkan, BK akan bekerja independen dalam menyelesaikan setiap kasus yang datang ke meja mereka. "Saya pastikan tidak ada kasus yang tidak diselesaikan BK. Alat kelengkapan dewan ini terbukti punya taring karena pernah menetapkan sanksi pemberhentian kepada anggota yang melanggar tata tertib," demikian Trimedy. (iky)/foto:rizka/parle/iw.

## Komisi X Minta Mendikbud Kaji Ulang Otonomi Pendidikan

Agenda Raker antara Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Senin (9/09) sedianya adalah Pembahasan RKA K/L Kemendikbud tahun anggaran 2014. Namun, sebagian anggota Komisi X justru malah menyoroti masalah otonomi pendidikan.

Anggota Komisi X Popong Otje Djundjunan meminta Kemendikbud untuk meninjau ulang kebijakan desentralisasi pendidikan. Pasalnya, belum lama ini marak beredar buku pelajaran yang materinya mengandung unsur tidak pantas yang tertulis dalam Buku

Bahasa Indonesia tingkat Sekolah Dasar (SD).

"Saya prihatin ketika mendengar ada berita soal peredaran buku pelajaran Bahasa Indonesia di Bogor, yang materinya tak layak untuk anak sekolah dasar. Bahasa yang digunakan kasar, saya sampai merinding waktu membacanya," kata Popong di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (9/09).

Hal ini, tambah Popong, adalah salah satu akibat buruk dari otonomi pendidikan. Oleh karena itu, ia meminta

kebijakan terkait otonomi pendidikan itu dikaji kembali.

Hal senada dengan Anggota Komisi X Reni Marlinawati. Ia mendukung pernyataan yang diucapkan oleh rekan satu komisinya, Popong. Bahkan, Reni juga menyarankan Kemendikbud untuk melakukan penarikan buku Bahasa Indonesia tersebut.

### Perlu pendalaman

Terkait dengan RKA K/L yang diusulkan oleh Mendikbud M Nuh, Komisi X perlu melakukan pendalaman lebih lan-



jut terhadap usul dan penjelasan pagu anggaran sebesar Rp 82 triliun. Pasalnya, Kemendikbud tidak menjelaskan program kerjanya secara rinci.

”Komisi X memerlukan pendalaman lebih lanjut terhadap usul dan penjelasan pagu anggaran sementara Kemendikbud tahun 2014 dalam RKA K/L RAPBN Kemendikbud tahun anggaran 2014,” ujar Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri membacakan hasil kesimpulan raker.

Untuk itu, Komisi X memberikan tiga catatan terhadap usul RKA K/L RAPBN Kemdikbud tahun 2014. *Pertama*, RKA K/L yang diusulkan harus mengacu pada RKA K/L yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangan dan RAPBN 2014 kepada DPR RI baik dari sisi organisasi, jenis belanja, fungsi, program, kegiatan, dan keluaran (out



Anggota Komisi X Popong Otje Djundjuran.

put), satuan biaya di setiap unit utama, dan rincian BNPB.

”*Catatan kedua*, alokasi belanja yang diusulkan perlu memperhatikan kebijakan pemerintah tentang lima langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara sebagaimana disampaikan dalam pidato Presiden RI

pada penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN tahun anggaran 2014 beserta nota keuangannya,” tambah Syamsul.

*Catatan berikutnya*, dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, perlu penajaman kembali terhadap program atau kegiatan, serta peningkatan anggaran yang diusulkan.

Terkait dengan RKA K/L 2014 yang belum disetujui, Komisi X dan Mendikbud RI sepakat untuk melakukan pendalaman untuk membahas dan menetapkan usul serta penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk RDP dengan masing-masing Eselon I beserta jajarannya yang dijadwalkan dalam waktu dekat. (cs,sf)/foto:wahyu/parle.

## Kasus Cebongan Momentum Balik Perkuat Disiplin Prajurit

Komisi I Apresiasi bahwa ada proses peradilan secara terbuka untuk Kasus Cebongan, dan harus menjadi momentum balik bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk betul-betul memperkuat disiplin internal prajurit.

”Saya apresiasi proses persidangan yang terbuka, dan apapun nanti putusan yang ada juga bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dituntut banyak pihak” kata Mahfudz Siddiq Ketua Komisi I DPR RI yang membicarakan Pertahanan dan Keamanan, kepada Parlemen, beberapa waktu lalu, di Gedung DPR RI.

Menurut Mahfudz Siddiq masih ada ketidakpuasan dan pertanyaan dari proses persidangan yang ada. “Misalnya yang sekarang diperdebatkan, apakah betul kasus ini adalah tindakan pembunuhan yang tidak direncanakan,” ungkapnya.

Tetapi terlepas dari itu, Mahfudz apresiasi proses persidangan yang terbuka apapun nanti putusan yang ada juga bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dituntut banyak



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

pihak. “Ini harus menjadi momentum balik bagi TNI, apalagi sudah punya Panglima yang baru, untuk betul-betul memperkuat disiplin internal prajurit,” tegasnya

Dan dijelaskan untuk memperkuat itu, Komisi I sudah menginisiasi Rancangan Undang-Undang Hukum Disip-

lin Militer (RUU HDM), dan ini sedang dalam pembahasan untuk penyusunan draf. “Mudah-mudahan ini menjadi instrumen hukum untuk memperkuat proses atau agenda peningkatan disiplin internal prajurit TNI,” jelas Mahfudz Siddiq dari F-PKS. (as)/foto:iwan armarias/parle.

# Menilik Mekanisme Pengambilan Keputusan Kelompok di DPR



Suasana seminar bertajuk 'Efektifitas Pengambilan Keputusan Kelompok di DPR RI'.

Produk kinerja DPR dihasilkan melalui rapat-rapat dan pengambilan keputusan secara berkelompok. Di mata masyarakat, 560 anggota Dewan belum berhasil menciptakan persepsi positif atas kinerja mereka.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

menyelenggarakan seminar bertajuk 'Efektifitas Pengambilan Keputusan Kelompok di DPR RI'. Acara berlangsung di Ruang Rapat Persipar, Gedung Nusantara II, Selasa (10/09).

"Dari berbagai survey, DPR mendapat sorotan citra yang negatif. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Diantara sekian banyak faktor, kami

menggaet salah satu bagian kecil yang mungkin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Apakah faktor interest, faktor pimpinan, atau faktor materi yang sangat diminati oleh masyarakat atau hal lain," ujar Lukman Nur Hakim, selaku Panitia Penyelenggara sekaligus Peneliti di P3DI.

Hadir sebagai pembicara, Anggota Komisi X Rully Chairul Azwar (F-Golkar), dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rachmadi Agus Triono, dan pakar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk.

Dalam paparannya, Rully menyatakan untuk pengambilan keputusan ada berbagai cara. Tentunya untuk mencapai keputusan yang efektif. "Dalam pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengalaman, juga bisa dengan agenda setting serta pencitraan orang itu sendiri," ujar Rully.

Dalam program seminar yang diadakan oleh P3DI juga turut dihadiri oleh anggota P3DI, pakar, peneliti, tenaga ahli, dan juga para mahasiswa UI. (sf,cs)/  
foto:rizka/parle/iw.



Anggota Komisi II dari F-PG Murad Nasir.

## Komisi II Minta Penetapan DPT Ditunda

Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masih banyak yang harus diverifikasi dan divalidasi, walaupun Sekjen KPU Irman menyatakan 99% data DPT sudah akurat.

Anggota Komisi II dari F-PG Murad Nasir, meminta KPU menunda penetapan DPT, sebelum semua pihak yang berkepentingan duduk bersama mencari kesepakatan. "Tunda penetapan DPT. Undang semua Parpol untuk duduk bersama, agar mengerti persoalannya," katanya.

Bila sudah duduk bersama, maka bisa menyamakan parameter dan akan menghasilkan kesepakatan bersama soal DPT. Selama ini parpol-parpol merasa belum sepatutnya



dengan KPU soal penetapan DPT. Di daerah-daerah, DPT bermasalah dan menjadi sumber konflik antara KPU dengan Parpol.

Hal yang sama disampaikan Jazuli Juwaeni Anggota Komisi II DPR. Ia menyatakan prihatin atas pernyataan Sekjen KPU yang terlalu terburu-buru menyatakan DPT sudah valid dan ingin segera diluncurkan ke publik. Anggota F-PKS tersebut meminta KPU agar duduk bersama lagi dengan Bawaslu dan penyelenggara Pemilu lainnya un-

tuk membenahi kembali DPT.

Menurut Jazuli, Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber rujukan penyusunan DPT harus pula divalidasi. Dengan begitu, pengumuman DPT diundur demi akurasi. Pada bagian lain, Jazuli menyatakan terkejut kinerja KPU terganggu oleh persoalan teknis anggaran.

Agenda Pemilu sudah berjalan, meskipun tidak boleh terganggu lagi oleh anggaran. Jazuli menyarankan agar

Pimpinan Komisi II memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan perihal anggaran yang belum cair. Ini sangat berdampak pada agenda Pemilu.

Namun demikian, Jazuli tetap mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu selama ini. Dia mengatakan, Pemilu harus berkualitas. Dan parameter Pemilu yang berkualitas adalah penyelenggaraannya yang jujur dan netral, serta data yang sudah valid. (mh), foto : wy/parle/hr.

## Anggota Dewan Dukung Pembuatan Peta Rawan Korupsi

Anggota DPR Hendrawan Supratikno mengapresiasi terhadap rencana pembuatan Peta Rawan Korupsi di DPR yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Setuju sekali, karena itu menjadi program DPR untuk memperbaiki citra dan kinerjanya, karena dinilai buruk oleh masyarakat. Upaya Pimpinan Dewan untuk membersihkan diri dari titik-titik korupsi itu penting sekali,” ungkap Hendrawan menjawab Parle sebelum RDP dengan KPK Rabu (11/9) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pembuatan peta rawan korupsi diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung ketika mengadakan pertemuan dengan Pimpinan KPK Selasa (10/9). Pertemuan tersebut dihadiri oleh lima pimpinan KPK, unsur pimpinan DPR dan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti.

Menurut Pramono, tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan dan penganggaran, dalam tugas itu ada diskresi atau kewenangan yang dimiliki DPR. Beberapa kewenangan itu rawan tindak pidana korupsi, maka DPR membuka diri bekerja sama dengan KPK supaya bisa terhindar dari persoalan korupsi.

“Nanti KPK akan menjelaskan semua titik-titik rawan yang mungkin terjadi korupsi, misalnya yang berkaitan dengan legislasi karena tidak menutup kemungkinan dalam legislasi ada ran-



Anggota Timwas Century DPR Hendrawan Supratikno.

cangan Undang-Undang atas desakan pihak tertentu atau hal yang berkaitan dengan badan anggaran, jadi dalam konteks itu kita lakukan kerja sama,” tambah Pramono.

Hendrawan menambahkan, citra buruk DPR antara lain dianggap sebagai pusat korupsi hulu dari berbagai persoalan bangsa, juga Dewan dianggap tidak memecahkan masalah, tetapi bagian dari masalah. Itu sebabnya upaya Pimpinan DPR untuk membersihkan diri dari tuduhan seolah-olah mekanisme dan prosedur yang dibangun DPR itu untuk merampok uang negara.

Ia mengungkapkan, dari ketiga fungsi pokok DPR, semua rawan korupsi

karena sistem politik di Indonesia berbiaya mahal maka politisi yang ditempatkan di manapun dan fungsi apapun, cenderung berperilaku untuk merespon kondisi biaya politik mahal itu.

Dia berharap semua kegiatan di DPR transparan, mengakui apa adanya secara jujur. Kalau terus menerus nyaman dalam kepura-puraan maka tidak pernah bisa memperbaiki diri. “Diskresi tanpa transparansi, itu korupsi. Kewenangan tanpa disertai keterbukaan dan tanggung jawab itu pasti penyalahgunaan wewenang,” tandas Hendrawan.

## Rawan Korupsi

Pramono Anung mengaku bahwa meski DPR sudah memiliki UU dan tata tertib dalam melakukan tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran, ternyata DPR masih rawan korupsi.

”Kemungkinan peristiwa korupsi yang semula hanya diduga di badan anggaran tapi terjadi juga proses legislasi, karena itu DPR perlu melakukan perubahan dan pembenahan karena

peristiwa korupsi ini menjadi musuh kita bersama,” tambah Pramono. Ia menekankan bahwa penekanan kemungkinan tindak pidana korupsi adalah saat proses pembahasan dan pengesahan UU

”Pendalaman oleh KPK bisa terjadi dalam semua tahapan, apakah dalam tahapan pengusulan, prolegnas atau dalam tahap pembahasan, atau persetujuan KPK dapat memberikan masukan, jadi ini belum terjadi korupsi,” ungkap Pramono dengan

mengharapkan kajian peta tersebut selesai pada November 2013 sebelum masing-masing anggota DPR kembali ke daerah pemilihan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengungkapkan bahwa tim survei KPK akan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPR dari seluruh anggota kelengkapan, komisi-komisi badan dan juga dari Sekjen. (mp), foto : iw/parle/hr.

# Kuasa Usaha Lebanon Harapkan Pertukaran Staf Kesetjenan DPR RI



Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti dengan Kuasa Usaha Kedubes Lebanon, Joanna Maria Azzi.

Lebanon berharap DPR RI dapat meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan Parlemen Lebanon, salah satunya dengan pertukaran staf.

Hal tersebut menjadi salah satu isi pertemuan antara Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti dengan Kuasa Usaha Kedubes Lebanon, Joanna Maria Azzi, di Gedung DPR RI, Rabu (11/9).

”Pertukaran staf ini tujuan utamanya untuk lebih mempererat hubungan bilateral kedua negara, selain itu juga dapat saling belajar sistem keparlemenan yang ada di negara masing-masing,” kata Win.

Ditambahkan Win, Indonesia dengan Lebanon memiliki persamaan sebagai negara yang mayoritas penduduknya

merupakan umat muslim dan dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, berbeda dengan Indonesia yang menyelenggarakan pemilu dalam lima tahun sekali, di Lebanon, Pemilu dilakukan dalam empat tahun sekali.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan situasi perpolitikan di kedua negara. Dimana Indonesia memiliki kondisi politik yang lebih baik dibanding Lebanon, yang diketahui Lebanon tengah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terutama pasca pemboman Lebanon yang menewaskan sekitar 70 orang dan melukai ratusan warga sipil.

”Sama seperti Indonesia, Lebanon juga prihatin dengan kondisi negara tetangganya Suriah. Terutama militer Suriah dalam menangani aksi demo warganya,” jelas Win sambil berharap konflik Suriah dapat segera berakhir sehingga tidak memperumit kondisi Lebanon.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Joanna Maria Azzi mengucapkan terimakasih yang besar atas dukungan dan keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian, UNIFIL (*United Nation Interim Force In Lebanon*). Secara langsung Indonesia membantu pemerintahan Lebanon dalam mengembalikan otoritas wilayahnya, selain tentunya yang utama mengembalikan kedamaian dan keamanan Lebanon dan internasional. (Ayu), foto : wy/parle/hr.



# Timwas DPR Terus Dorong KPK Lebih Optimal Ungkap Kasus Century



Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Tim Pengawas kasus Century DPR mengapresiasi hasil kerja KPK dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kasus Bank Century. Selain itu Timwas Century terus mendorong KPK untuk lebih optimal lagi dalam mengungkap kasus Bank Century.

Demikian kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Timwas Century DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dalam RDP ini sejumlah anggota Timwas menyatakan kekecewaannya setelah mendengar penjelasan Ketua KPK Abraham Samad mengenai *progress report* penanganan kasus Bank Century. Peralasan kasus yang muncul sejak tahun 2009 itu belum ada perkembangan yang signifikan. Indra dari FPKS, Prof. Hendrawan Su-

pratikno dari FPDIP serta Ahmad Yani dari FPP menilai penanganan kasus Century begitu lambat dan tidak ada lompatan-lompatan yang berarti.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Abraham Samad yang didampingi Wakil Ketua Zulkarnain menjelaskan bahwa kasus Century bukanlah satu-satunya kasus yang lama penanganannya, sebab ada beberapa kasus seperti Dewi Ratna Umar dalam kasus Alkes selama 4 tahun. Burhanudin Husein 3 tahun. “Jadi sangat naif kalau hanya dianggap kasus Century yang lama penyelesaiannya,” ungkapnya.

Kasus Bank Century, lanjut Samad, baru disidik tahun 2012 sehingga baru setahun, meski kasus ini muncul sejak tahun 2009. Namun kritikan DPR dapat diterima dan menjadi masukan yang bagus dalam meningkatkan kinerja. “Yang jelas KPK terus mendalami ka-

sus Century dan terpenting konstruksi hukumnya telah disampaikan dalam rapat tertutup tanggal 10 Juli lalu,” jelasnya.

Ketua KPK juga menegaskan, tidak perlu ada keraguan kepada KPK dan mendolimi kepada tersangka BM dan hanya membongkar kasus-kasus di tingkat bawah. Ada contoh menarik, ketika KPK tetapkan Dedy Kusnidar dalam kasus Hambalang, hanya dianggap hanya sebagai korban, dan tidak bisa menetapkan menteri sebagai tersangka. Kenyataannya, akhirnya Menteriinya ditetapkan sebagai tersangka. “Mohon waktu, doakan saja selamat sehingga bisa menuntaskan kasus Century secara komprehensif,” pintanya.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan, kemajuan *progress report* dalam kasus Century, KPK telah meme-

riksa 57 orang saksi, tetapi sebetulnya saksi-saksi ini diperiksa sudah 102 kali tatap muka dengan penyidik. Ada yang 22 kali ada yang 5-6 kali, sebab dari keterangan yang didapat KPK masih perlu pendalaman lagi.

“Kalau pada tanggal 10 Juli lalu perkembangan penanganan kasus sekitar 50%, namun sekarang sudah

sekitar 60%,” katanya dengan menambahkan dari pemeriksaan ini saling menguatkan.

Ketika didesak anggota FPP Ahmad Yani bahwa yang sudah ditetapkan tersangka dua orang dan seorang yakni Budi Mulya (BM), kapan diajukan ke persidangan dan ditahan KPK, Zulrkarnain menjelaskan tahun ini BM

bisa diajukan ke pengadilan. Harapannya, kasus ini bisa selesai akhir tahun, dan ini akan menyenangkan KPK. “Tanpa dikawalkanpun keinginan kami tidak akan luntur untuk mempercepatnya, karena kasus ini merupakan beban untuk menyelesaikannya,” imbuh Zulkarnain. (mp), foto : iw/parle/hr.

## Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Anggaran Riset Jadi Satu Persen PDB



Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana.

Komisi VII DPR mendorong peningkatan anggaran penelitian menjadi satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi VII DPR dengan Menteri Ristek Gusti Muhammad Hatta yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, di Gedung DPR, Rabu Siang, (11/9).

Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoegana mengatakan, selama ini anggaran Ristek Indonesia selalu tertinggal dibanding negara lainnya. “Bahkan anggaran Riset di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang sangat besar dan kita berharap kenaikan anggaran

ini dapat meningkatkan kontribusi riset dalam kemajuan perekonomian,” ujarnya.

Sementara Dewi Aryani (F-PDIP) mengharapkan Ristek dapat memberikan kontribusi terkait persoalan kedelai yang harganya melambung tinggi. “Kedelai tidak hanya soal bibit karena itu bukan hanya soal teknis mikro tetapi Ristek harus menjadi *leader* dalam memecahkan persoalan ini,” katanya. Pada kesempatan itu, Komisi VII dalam kesimpulannya juga menerima pagu anggaran 2014 kemenristek sebesar 4.923 Triliun. (si) foto : wy/parle



Seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI turut berdukacita atas meninggalnya:

**Rudi Martuali Gultom, SE**

Karyawan Bagian Pemberitaan DPR RI



# Perhatian Pemerintah Minim Terkait Tingginya Kecelakaan Roda Dua

Mayoritas anggota Komisi V DPR menyayangkan tidak adanya terobosan pemerintah terkait maraknya kecelakaan kendaraan roda dua. Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR mengadakan RDP dengan jajaran Sekjen dan Irjen Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara, Rabu sore, (12/9). "Ini anggaran Perhubungan tidak ada terobosan sama sekali, dan tidak pernah melibatkan masyarakat transportasi," ujar Anggota DPR Epyardi Asda dari Fraksi PPP.

Epyardi mengaku miris jalan raya masih menjadi pembunuh paling dahsyat. Sementara perhatian pemerintah masih minim terhadap kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua. "perlu segera dilakukan sosialisasi melalui media massa terkait keselamatan di jalan raya," katanya.

Dia menambahkan, dirinya mendukung penuh anggaran untuk sosialisasi di berbagai media massa. "Anggaran di Perhubungan sebesar Rp. 35 triliun tapi untuk sosialisasi tidak dianggarkan saya mendukung adanya informasi secara langsung untuk tercapainya keselamatan transportasi," tandasnya.

Sementara Abdul Hakim (F- PKS) mengatakan perlu segera dikaji penggunaan angkutan roda dua saat lebaran. "Perlu dikaji mendalam, mengingat 40 persen kecelakaan terjadi karena kecelakaan roda dua," tambahnya.



Anggota Komisi V DPR Epyardi Asda .

Menurutnya, kita semua tidak ingin nyawa sia-sia di jalan raya. "Ini sudah darurat dan perlu pemikiran mendalam jangan sampai rakyat kita mati sia-sia di jalan raya," katanya.

Seperti diketahui, kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya meliputi 2.830 sepeda motor, 653 mobil penumpang, 291 mobil barang, 159 bus, 15 kendaraan khusus serta 106 kendaraan tidak bermotor. (si) foto : wyl/parle

## Ketua DPR Apresiasi Simposium Pemuda Mencari Presiden

Ketua DPR Marzuki Alie menyambut baik rencana KNPI menggelar Simposium "Pemuda Mencari Presiden" sebab merupakan kepedulian anak-anak muda terhadap demokrasi, pemimpin masa depan bangsa dan pemilu 2014. Pasalnya peran para pemuda termasuk partisipasi mereka pada pemilu semakin menurun menjadi apatis.

Hal itu dikatakannya ketika menerima delegasi KNPI yang dipimpin M. Sukur Mandar selaku Kepala Bidang Politik DPP KNPI di ruang kerja Ketua DPR Lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Selanjutnya Ketua DPR berpesan, sepanjang dilakukan dengan baik dan memberi ruang yang sama dalam menjangkau calon Presiden untuk menyampaikan pandangan dan gagasan merupakan hal yang baik. Dengan demikian, ke depan kita betul-betul mendapatkan orang yang mumpuni untuk memimpin negeri ini.

"Kepada para calon hendaklah semuanya dibedah rekam jejak dan latar belakangnya, kemudian bagaimana kapasitasnya sehingga didapatkan pemimpin yang memiliki

kapabilitas jangan hanya tinggi popularitasnya saja," ungkapnya.

Sebaik-baiknya, lanjut Marzuki, pemimpin itu adalah tokoh yang disukai dan juga punya kemampuan. Tetapi kalau kita mendapatkan hanya pemimpin yang disukai tetapi tidak punya kemampuan, ini akan menjadi kecelakaan politik bagi Indonesia. Tahun 2014 adalah masa transisi, apakah kita akan maju atau mundur ke belakang. "Kita harus mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai harapan kita semua," jelas Ketua DPR.

Kepada para pemilih muda, Marzuki Alie menyatakan sedang melakukan pencerahan terus menerus kepada anak-anak muda supaya ikut bertanggungjawab akan masa depan bangsa, jangan apatis. Mau tidak mau, parpol sebagai pilar demokrasi harus ikut perbaiki bila dianggap tidak memberi harapan.

"Oleh karena itu jangan apatis, mereka harus berkontribusi. Apakah ikut masuk parpol, mengkritik, kemudian saat pemilu memberikan suara mana yang terbaik dari yang



Ketua DPR Marzuki Alie berjabat tangan dengan pengurus DPP KNPI.

tidak baik, atau mana yang terbaik dari yang baik,” demikian Marzuki.

Dalam kesempatan ini Sukur Mandar menjelaskan, Simposium Nasional “Pemuda Mencari Presiden” akan digelar dari tanggal 22-25 Oktober mendatang. Simposium dimaksudkan sebagai dukungan kepada semua tokoh nasional untuk mengambil bagian bagi terpilihnya pemimpin nasional yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan bermartabat.

Dalam rangkaian acara itu juga akan digelar diskusi politik yang bertema pemilu 2014, dengan maksud mendorong suksesnya pemilu legislatif dan pemilu Presiden mendatang. Tema yang diusung adalah Pemilu Bersih 2004 sehingga pesta demokrasi lima tahunan itu harus lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. (mp) foto : wy/parle

## Kasus Dul Bisa Jadi Pelajaran dan Bahan Revisi UU PA

Kasus kecelakaan yang melibatkan putra bungsu artis Ahmad Dhani bisa menjadi pelajaran dan bahan dalam revisi Undang-undang perlindungan Anak.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII, Sayed Fuad Zakaria kepada Parle di gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Kamis (12/9). Dikatakan dalam UU Perlindungan Anak yang akan direvisi ini salah satunya akan membahas tentang peradilan anak bagi anak yang melakukan tindakan melanggar hukum.

“Tentu hukum yang akan diberikan kepada anak berbeda dengan orang dewasa. Tujuan hukuman itu juga untuk lebih melakukan pembinaan dan pendidikan bagi masa depannya. Agar jangan sampai karena dia mendapat hukuman akibat perbuatannya itu malah justru mengabaikan kesempatan si anak untuk mendapat pendidikan yang terbaik.



Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria.

Ditambahkan Sayed, memperbaiki atau merevisi Undang-undang peradilan anak ini juga menjadi *control* kepada orangtua untuk lebih bijak dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam kasus kecelakaan tersebut Sayed cukup prihatin. Meski demikian, ia lebih memprihatinkan anak-anak dari keenam korban me-

ninggal dunia itu. Dimana kesemuanya akan berstatus sebagai yatim, bahkan diantaranya ada yang menjadi yatim piatu, karena telah ditinggalkan ibunya sebelumnya.

“Saya prihatin dengan kondisi Dul, tapi saya lebih prihatin dengan kondisi anak-anak yang ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Bagaimana dengan masa depan mereka. Belakangan saya melihat media malah cenderung lebih mengekspose tentang kondisi Dul, tetapi bagaimana dengan anak-anak yang menjadi yatim, bahkan ada yang menjadi yatim piatu akibat kecelakaan tersebut. Disini saya melihat pemberitaan kok malah terbalik,” ungkap Sayed.

Sayed mengatakan bahwasanya Dul sebagai orangtua Dul telah bertanggung jawab dan mengunjungi para korban, perlu diapresiasi. Namun lebih dari itu yang harus lebih dipikirkan adalah nasib anak-anak korban meninggal dunia ke depannya.



Untuk itu Sayed juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan anak-anak tersebut. Jangan sampai kesempatan untuk mendapat pendidikan dan

meraih masa depan yang lebih cerah dari anak-anak tersebut menjadi hilang karena peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa orangtua mereka.

Selain itu Sayed berharap meski keluarga korban sudah mengkhilaskan

kepergian keluarganya, namun ia berharap agar hukum tetap dilanjutkan. Agar hal tersebut menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga orang lain agar tidak melakukan hal serupa. (Ayu) *foto : ry/parle*

## Perusahaan Investasi Bodong Harus Bertanggung Jawab

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menegaskan bahwa perusahaan investasi emas bodong harus bertanggung jawab kepada nasabahnya. Ia mewanti-wanti agar jajaran direksi ini jangan sampai kabur ke luar negeri.

Hal ini terungkap ketika rapat antara Komisi XI, nasabah korban penipuan investasi emas dengan pemerintah dan perusahaan investasi. Hadir dalam rapat, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto, Pejabat Eselon II Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hardiyatmo,

Selain itu, hadir pula Kabareskrim Sutarman, Ketua Dewan Syariah Nasional MUI KH Maaruf Amin, Direktur Utama PT GBI (Gold Bullion Indonesia) Fadli Bin Muhammad, Dewan Pengawas Syariah PT GTIS (Gold Trader Indonesia Syariah) Aziddin.

“Kepada perusahaan investasi masih punya tanggung jawab, jangan sampai mereka kabur ke luar negeri. Supaya hak nasabah tetap terjaga. Bagi kasus individu atau nasabah yang merasa tertipu, pihak kepolisian harus memfasilitasi. Yang kasus perdata, tampaknya harus melalui pengadilan,” jelas Harry saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Selasa (10/09) malam.

Harry menambahkan, pihaknya meminta pihak berwajib untuk mempertimbangkan terkait direksi perusahaan yang melarikan diri. Bahkan, bila perlu pelakunya ditangkap.

“Beberapa orang sudah lari, dan saya tidak tahu apakah bisa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau menjadi buronan internasional? Saya minta itu dipertimbangkan. Khususnya yang sudah kabur ke ujung dunia itu perlu ditangkap,” tegas Politisi Golkar ini.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Nusron Wahid meminta BKPM untuk melakukan moratorium pada perizinan bisnis semacam investasi, perdagangan dan sejenisnya. Ia menegaskan BKPM harus memastikan keabsahan perusahaan, agar tidak timbul korban-korban baru.

“Kalau memang masih ada, mau Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis

melakukan bisnis ini, dan menjalankan bisnis investasi, tapi menggunakan aktifitas yang ‘nyerempet-nyerempet’ investasi, itu harus dilakukan *suspend*. Jadi, ini semacam peringatan dan minta dihentikan untuk sementara waktu, sebelum mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, yaitu OJK,” tegas rekan satu fraksi Harry ini.

Sedangkan, Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyatakan harus ada waktu untuk menyelesaikan kasus ini, karena dalam kasus ini ada pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu ada evaluasi oleh seluruh pihak yang terkait dengan bisnis investasi ini.

“Harus ada langkah seperti *market intelligent*. Kita berikan waktu, misalnya satu bulan untuk evaluasi menyeluruh terhadap model investasi seperti ini. Semua jenis bisnis harus dievaluasi oleh seluruh pihak terkait. Terutama yang tergabung dalam Satgas Waspada Investigasi. Jangan sampai nanti muncul lagi masalah seperti ini,” tegas Arif.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu, Komisi XI sudah menerima pengaduan dari perwakilan nasabah korban perusahaan investasi emas. Para nasabah meminta kepada DPR untuk membantu pengembalian investasi mereka. Dalam hal ini, PT GBI melarikan uang nasabah sebesar Rp 1,2 triliun. (sf) *foto : iw/parle/hr*



Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan BKSAP mengadakan pertemuan dengan para duta besar negara-negara ASEAN, membahas persiapan pertemuan parlemen dunia termasuk ASEAN dalam forum SEAPAC (South East Asia Parliamentarians Against Corruption) dan GOPAC (Global Parliamentarians Against Corruption), di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Odjie/Parle.



Suasana RDP Timwas Century DPR dengan KPK di Gedung Nusantara, Rabu (11/09)  
Foto: Iwan Armanias/Parle.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Sekjen Kemenkeu di Gedung Dhanapala, Kantor Kemenkeu, Kamis (12/09) Foto: Wahyu/Parle.